



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tanggerang@gmail.com

PENGUMUMAN

PERPANJANGAN WAKTU SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor:928/SEK.01.W29.U4/PL1.1.5/XII/2025

Sehubungan dengan pengumuman Nomor:921/SEK.01.W29.U4/PL1.1.5/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Seleksi Calon Penyedia Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan ini disampaikan bahwa penyedia belum memenuhi jumlah minimal. Menindaklanjuti hal tersebut, bersama ini diumumkan bahwa waktu pendaftaran yang semula berakhir tanggal 23 Desember 2025, **diperpanjang hingga tanggal 2 Januari 2026.**

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan ini Pengadilan Negeri Tangerang membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Umum

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum
Lingkup Pekerjaan : Pemberi Layanan Bantuan Hukum
Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1 A Khusus
Alamat : Jalan TMP Taruna No. 7 Tangerang
Nilai Total HPS : Rp. 100.000.000,-
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2026,
No. SP DIPA-005.01.2.099077/2025 tanggal 01 Desember 2025

B. Formasi Penerimaan

1. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultansi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi.
2. Telah memiliki surat pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM
3. Telah terakreditasi sebagaimana SK Menteri Hukum, minimal "B" oleh Kemenkum RI, diutamakan yang terakreditasi "A" oleh Kemenkum RI
4. Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang.
5. Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tangerang selama tahun anggaran 2026 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, S1 Hukum atau Sarjana Hukum Islam, yang menguasai Hukum dan Memiliki staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam.
7. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak.
8. Penyedia telah terdaftar dalam Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia-
<https://sikap.lkpp.go.id>)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tangerang@gmail.com

C. Persyaratan

1. Mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Up. Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2026 Pengadilan Negeri Tangerang yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Penyedia wajib terdaftar dalam APLIKASI SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia - <https://sikap.lkpp.go.id>)
3. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi.
4. Telah terakreditasi minimal "B" oleh Kemenkum RI, diutamakan yang terakreditasi "A" oleh Kemenkum RI.
5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer/Laptop, Printer dan Alat Tulis Kantor.
6. Surat keterangan Domisili Lembaga.
7. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum.
8. Melampirkan daftar nama petugas yang akan ditugaskan dalam Posbakum, sebanyak 20 (dua puluh) orang dan menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum di layanan Posbakum yang berada di PTSP.
9. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga.
10. Melampirkan Bukti Setor Pajak Tahunan (SPT).
11. Membuat Surat Pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas.
12. Tidak masuk dalam daftar hitam, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
13. Bersedia mengikuti Tes Kompetensi, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
14. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi.
15. Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Tangerang.
16. Tidak terafiliasi/tidak mempunyai konflik kepentingan dengan aparatur Pengadilan Negeri Tangerang, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
17. Diutamakan mempunyai inovasi Posbakum yang ditampilkan pada uji kompetensi.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tangerang@gmail.com

D. Pendaftaran, Waktu dan Tempat

1. Pemasukan Dokumen Penawaran : 18 Desember 2025-2 Januari 2026
2. Berkas Penawaran dan Lampirannya
ditujukan kepada : Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Up. Pejabat
Pengadaan Posbakum TA 2026 Pengadilan Negeri
Tangerang

E. Proses Pengadaan

1. Pembukaan Dokumen Penawaran : 5 Januari 2026
2. Evaluasi Dokumen Penawaran : 5 Januari 2026
3. Tes Kualifikasi : 6 Januari 2026

F. Penetapan Penyedia Jasa dan Penandatanganan SPK

1. Penetapan Penyedia Jasa : 9 Januari 2026
2. Penandatanganan SPK : 12 Januari 2026

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Pejabat Pembuat Komitmen DIPA 03
Pengadilan Negeri Tangerang

Diniarti Mayaciptani

Tangerang, 23 Desember 2025
Pejabat Pengadaan Jasa Posbakum
Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Arif Tito Yuliansyah